

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Analisis Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu:

Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Wae Rii sepenuhnya belum terlaksana hal ini dapat dilihat dari tugas pokok yang telah di laksanakan oleh BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa dengan kepala Desa.

Mengenai fungsi pengawasan yang di lakukan oleh BPD telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDesa.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah Di Desa Wae Rii di pengaruhi dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan pemerintah Desa. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, dan hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan pemerintah Desa. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang di tetapkan.

6.2 Saran

Setelah kita memperhatikan hasil penelitian diatas, menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Kepada BPD

BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak lagi perbedaan pendapat dalam proses pembentukan pembangunan di Desa Wae Rii, dalam melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor Desa untuk melaksanakan kewajibanya dan lebih mempermudah dalam berkordinasi dengan Kepala Desa.

2. kepada Pemerintah Desa

Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kerja sama antara kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perlu di pertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan. Dengan mempertahankan kerja sama, diharapkan program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik dengan apa yang sudah direncanakan.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat di harapkan agar dapat memberikan dukungan partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasanya. Serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Desa karena pembangunan tersebut semata-mata untuk masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Albert, *Otonomi Daerah*, PT. Percetakan Penebar Swadaya. Jakarta: 2002
- Anwar, Khairul, Muhammad. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*. UNRI Pers.
2003
- Kencana, Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2002
- Morissan, Andy Chorry. W, Farid Hamid. U. 2012. Metode Penelitian Survey. Jakarta: Kencana
- Ndraha, Taliziduha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
Jakarta: 1991
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta:
Erlangga
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Edisi Revisi).
Jakarta PT Gramedia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 13 Tahun 2011, *Tentang Badan
Permasyarakatan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Peraturan Desa*
- Rivai Veithzal, *Kepemimpinan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Santosa, Budi. *Desa Dan Pemerintahannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2003
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pendekatan Perilaku*. Sinar Baru. Bandung: 1999

Sumadilaga, Ruman. *Peradaban Sosiologi Pedesaan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2007

Sumardjan, Selo. *Perkembangan Kehidupan Pedesaan*. PT. Grafindo Persada. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2004

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung: 2007

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Internet:

<https://sastra.desa.id.first.artikel> Badan permusyawaratan Desa

<http://binapembdes.kemendagri.go.id> Peran BPD

<https://journal.unhas.ac.id> Analisis peran BPD